

JUDUL.....	i
HALAMAN DEWAN PENGUJI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGANTAR.....	iv
INTISARI.....	vi
ABSTRACTION.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A.	LATAR BELAKANG..... 1
B.	PERUMUSAN MASALAH..... 13
C.	TUJUAN PENELITIAN..... 16
D.	MANFAAT PENELITIAN..... 16
E.	KEASLIAN PENELITIAN..... 17
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A.	SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN, ASAS-ASAS SUATU PERJANJIAN, DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN YANG SAH..... 21
B.	IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE..... 27
C.	TERKAIT DENGAN OBJEK PERJANJIAN BERUPA ASET NEGARA DALAM BENTUK TANAH..... 29
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
A.	SIFAT PENELITIAN..... 36
B.	JENIS PENELITIAN..... 37
C.	DATA PENELITIAN..... 38
1.	Data Yang Digunakan..... 38
2.	Cara Pengumpulan Data..... 39
3.	Teknis Analisis Data..... 39
4.	Jalannya Penelitian..... 40
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>
A.	PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN ASET ANTARA IPC DAN JICT..... 42
A.1.	Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian Dan Pemeliharaan Terminal Petikemas Di Tanjung Priok..... 43
A.2.	Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan, Dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas Di Tanjung Priok..... 46
B.	PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN ASET DITINJAU DARI SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN..... 47
B.1.	Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya..... 48
B.2.	Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan..... 52
a.	Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas..... 53

b.	Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran & Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1996 Tentang Kepelabuhanan.....	55
c.	Ditinjau Dari Status Tanah HPL.....	58
B.3.	Suatu Pokok Persoalan Tertentu.....	59
a.	Perjanjian Kuasa Operasi.....	59
b.	Perjanjian Tanah HPL.....	62
B.4.	Suatu Sebab Yang Tidak Terlarang.....	68
C.	AMANDEMEN TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN ASET ANTARA IPC DAN JICT.....	70
C.1.	Kronologis Efek Yang Ditimbulkan Pendandatanganan Amandemen Perjanjian Kuasa Operasi.....	75
C.2.	Amandemen Perjanjian Kuasa Operasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Syarat- syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	80
C.2.a.	Kesepakatan Mereka Yang mengikatkan Dirinya.....	81
C.2.b.	Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan.....	82
C.2.c.	Suatu Pokok Persoalan Tertentu.....	97
C.2.d.	Suatu Sebab Yang Dilarang.....	97
C.3.	Amandemen Perjanjian Kuasa Operasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Good Corporate Governance.....	107
D.	PERKEMBANGAN TERAKHIR MENGENAI AMANDEMEN PERJANJIAN KUASA OPERASI TERKAIT DENGAN PERPANJANGAN KONSESI JICT.....	110